

BAB V

KESIMPULAN

Klientelisme erat kaitannya dengan politik elektoral, di mana hubungan timbal balik antara patron dan klien biasanya terjadi dalam bentuk pertukaran dukungan suara dengan sumber daya material yang diberikan oleh patron. Namun, di Desa Bangbayang praktik klientelisme justru ada didalam pelayanan publik bukan dalam arena elektoral. Hubungan saling memberi dan menerima yang akarnya dari relasi patron klien terjadi ketika warga desa menghadapi kesulitan dalam mengakses pelayanan public lalu lebih memilih menitipkan urusan mereka kepada perangkat desa dengan imbalan uang. Praktik yang sudah membudaya ini menunjukkan bahwa relasi patron klien tidak hanya terjadi dalam konteks elektoral saja tetapi bisa juga dalam praktik sehari hari pelayanan publik di tingkat desa. Berbeda dengan suap, klientelisme merupakan pola pertukaran yang berulang dan bersifat timbal balik sedangkan suap merupakan tindak pidana yang bersifat transaksional sekali waktu dan diatur secara tegas dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Beberapa faktor faktor seperti penyimpangan tupoksi oleh perangkat desa, warga yang tidak melek teknologi digital, proses administrasi yang rumit, adanya dinamika sosial politik yang pernah terjadi terkait kepemimpinan pemerintahan desa di masa lalu menjadi faktor yang melanggengkan klientelisme di pelayanan publik Desa Bangabyang. Beberapa dampak yang ditimbulkan apabila warga terus bergantung kepada perangkat desa dalam mengurus urusan administrasi adalah menghambat kemandirian warga, serta menciptakan kesenjangan akses pelayanan yang akan terjadi terus menerus. Pemekaran wilayah kini menjadi solusi nyata yang sangat diinginkan oleh berbagai pihak untuk mendekatkan pelayanan publik dengan warga. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan dapat memberikan solusi pemekaran wilayah supaya pelayanan publik dapat diakses dengan mudah oleh warga di suatu wilayah yang sulit menjangkau pelayanan. Selain itu sosialisasi lebih intens terkait penggunaan teknologi digital juga dapat menjadi solusi supaya warga bisa mandiri dalam mengurus urusan administrasinya.